



**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO KUALA**

RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Segenap masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang kami cintai dan kami banggakan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah yang tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

RLPPD disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala selama Tahun 2024.

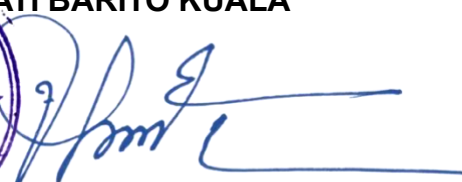
Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi serta meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami sangat berharap bahwa kolaborasi dan sinergitas tetap terjalin utuh dan terus bekerja bersama untuk mewujudkan **KABUPATEN BARITO KUALA “SATU” (SEJAHTERA, AGAMIS, TERPADU, dan UNGGUL.”**.

Marabahan, Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA




Dr. H. BAHRUL ILMI, S.H., M.H



BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,67	71,40	1,033
2	Angka Kemiskinan	4,60	4,36	-5,217
3	Angka Pengangguran	3,42	3,41	-0,292
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,07	5,02	23,324
5	Pendapatan Per Kapita	32.389,09	34.292,14	5,876
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,312	-	-

Sumber Data : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2025

Secara garis besar laju kinerja pada Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan indikator kinerja makro ini menandakan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mencapai 71,40 berada pada kategori “tinggi”. Capaian ini meningkat sebanyak 0,73 poin (1,03 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 70,67. Selama 2020-2024, IPM Kabupaten Barito Kuala rata-rata meningkat sebesar 1,92 persen. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS), dan standar hidup layak (Pengeluaran Riil Perkapita). Dengan capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala.

Pada indikator angka kemiskinan, berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terjadi penurunan untuk penduduk miskin setiap tahunnya. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 4,36 Persen turun dari tahun 2023 yang sebesar 4,60 persen.

Selanjutnya, Pengukuran angka pengangguran di Kabupaten Barito Kuala menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala. Menurunnya nilai TPT Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024, yakni menjadi sebesar 3,41 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 3,42 persen, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024. Tanda negatif (-) pada laju kinerja indikator angka kemiskinan dan angka pengangguran menandakan bahwa indikator tersebut menunjukkan laju penurunan.

Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala secara agregat mengalami peningkatan pada tahun 2024, yang digambarkan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dari 4,07 persen pada 2023 menjadi 5,02 persen pada 2024 dengan peningkatan laju kinerja sebesar 23,34 persen. Pada 2024, PDRB perkapita Kabupaten Barito Kuala sebesar 34,29 Juta Rupiah kembali mengalami peningkatan positif sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.



Meski pertumbuhan ekonomi meningkat, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya mengatasi kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh Gini Rasio sebesar 0,312 pada tahun 2023. Berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan, digencarkan untuk menciptakan peluang yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk angka gini rasio Kab. Barito Kuala Tahun 2024 belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

**BAB II****RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan**a. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,56%	92,91%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,08%	98,60%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,99%	95,16%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	86,14%	85,81%



Terjadi peningkatan pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama yaitu capaian tahun 2024 sebesar 95,16%, sedangkan tahun 2023 hanya sebesar 94,99% dengan laju kinerja sebesar 0,17%.

Sedangkan, kinerja pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami sedikit penurunan.

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebesar Rp 542.242.696.731 dengan program/kegiatan unggulan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, yang terdiri dari kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Daerah, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Penurunan kinerja pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu 1) masih ditemukannya Penduduk Usia Sekolah yang bersekolah di Pesantren Salafiyah dengan kondisi tidak terdata pada database Pendidikan, 2) penduduk yang tidak melakukan cabut berkas/data Kependudukan pada saat pindah wilayah sehingga



masih tercatat sebagai penduduk Kab. Barito Kuala, dan 3) masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-12 tahun dengan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, pernikahan dini, dan disabilitas.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,59	0,58
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,03%	92,10%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,48%	99,11%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,95%	98,68%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,50%	86,19%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	89,40%	97,74%



	kesehatan sesuai standar		
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,69%	84,71%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,49%	90,01%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53,73%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85,73%	100%

Pada urusan kesehatan, dari 14 indikator sebanyak 7 indikator mengalami kenaikan laju kinerja, 4 indikator dengan laju kinerja tetap, dan 3 indikator mengalami penurunan. Indikator yang mengalami penurunan, yaitu pada indikator Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan, indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, dan indikator Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

**b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan**

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebesar Rp 259,095,189,190.36 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, dan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang terdiri dari kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat, dan kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
- 4) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terdiri dari kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kab/Kota, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kab/Kota, dan oebgembangan dan



pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kab/Kota.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami penurunan laju kinerja karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terdapat sebanyak 347 ibu hamil yang belum menyelesaikan kunjungan 6 kali (K6) pada tahun 2024 karena usia kandungan yang belum saatnya untuk diberikan kunjungan sehingga tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Ibu hamil dinyatakan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar jika sudah mendapatkan kunjungan 6 kali (K6). untuk Kunjungan pertama kali (K1) sudah dilakukan kepada seluruh ibu hamil. Pada indikator Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan laju kinerja karena disebabkan oleh karena masih ada beberapa persalinan yang dilakukan diluar fasyankes sehingga tidak tercatat sebagai capaian kinerja.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	53,27%	54,28%



	infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota		
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	73,42%	74,12%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	66,82%	73,17%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,16%	78,76%
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%	100%
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	67,25%	67,50%
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	73,35%	74,72
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%



Pada urusan pekerjaan umum, dari 9 indikator sebanyak 7 indikator mengalami kenaikan laju kinerja, 2 indikator dengan laju kinerja tetap, dan tidak ada indikator yang mengalami penurunan laju kinerja. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Barito Kuala.

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebesar Rp 303.572.309.006 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- 3) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- 5) Program penataan bangunan gedung
- 6) Program penataan bangunan dan lingkungannya
- 7) Program penyelenggaraan jalan
- 8) Program pengembangan jasa konstruksi
- 9) Program penyelenggaraan penataan ruang

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum terutama pada indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, yaitu Kapasitas produksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM masih kurang mencukupi, Masih sulitnya mencari lahan/lokasi untuk sarana Air limbah di permukiman, Demografi penduduk di kabupaten Barito Kuala



yang tersebar dengan jarak yang berjauhan antar pemukiman sehingga menyebabkan perencanaan untuk akses air minum harus memerlukan investasi yang besar untuk jaringan perpipaan, dan Mindset dan culture set masyarakat yang pada umumnya masih belum bisa terlepas dari sungai sebagai pusat aktifitas rumah tangga seperti untuk keperluan MCK.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	38,64%	62,63%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,08%	13,79%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	49,24%	58,00%



Pada urusan perumahan rakyat, dari 5 indikator sebanyak 4 indikator menunjukkan tren peningkatan laju kinerja pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023. Sedangkan, 1 indikator yaitu indikator Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) mengalami penurunan disebabkan oleh kesalahan penyajian data pada tahun 2023.

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan perumahan rakyat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebesar Rp 64.551.229.977 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan perumahan, yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota dan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- 2) Program kawasan permukiman, yang terdiri dari kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
- 3) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, yang terdiri dari kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/Kota.
- 4) Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), yang terdiri dari kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan.
- 5) Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri dari kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.



- 6) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, yang terdiri dari kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat terutama pada indikator Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, yaitu sulitnya mencari lahan pengganti bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum Linmas
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100%	100%



	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	3,9 menit	6,82 menit

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, capaian kinerja hampir pada seluruh indikator mengalami kenaikan pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023. Hanya 1 indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran. Hal ini disebabkan oleh perbedaan rumus perhitungan data. Secara pelayanan, telah dipenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran sesuai standar pada rentang waktu 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi.

b. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebesar Rp 17.952.095.135 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, yang terdiri dari kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kab/Kota, dan penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.



- 2) Program penanggulangan bencana, yang terdiri dari kegiatan pelayanan informasi rawan bencana Kab/Kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
- 3) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, yang terdiri dari kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu kurangnya sarpras dan peralatan penyelamatan yang sesuai standar baik untuk layanan trantibum, kebencanaan, dan damkar, kurangnya personil Tim Reaksi Cepat serta kurangnya tenaga yang terlatih, Kurangnya sumber daya aparatur penyuluh bersertifikat.

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	100%	100%



	terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

Secara keseluruhan capaian kinerja urusan sosial Tahun 2024 udah memenuhi target dengan capaian 100% pada keseluruhan indikatornya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serius dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 sebesar Rp 7.586.731.701 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program pemberdayaan sosial, yang terdiri dari kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program rehabilitasi sosial, yang terdiri dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- 3) Program perlindungan dan jaminan sosial, yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,
- 4) Program penanganan bencana, yang terdiri dari kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.



BAB III

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Barito Kuala berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1443 dan status kinerja sedang. Hasil EPPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan hasil EPPD Tahun 2021 yang hanya memperoleh skor kinerja 2,46 dengan status kinerja sedang.

Hasil EPPD Tahun 2023 belum dirilis Keputusan Menteri yang mengatur hal tersebut, sehingga belum diketahui skor kinerjanya.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 4.B/LHP/XIX.BJM/04/2024, Kabupaten Barito Kuala berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 yang berarti sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB IV

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Unaudited Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mencapai sebesar Rp 1.914.708.609.471,16 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mencapai Rp 1.940.244.032.483,07.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
**Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Realisasi
Pendapatan Daerah T.A 2024**

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
I	Pendapatan Daerah	1.821.774.903.684,00	1.914.708.609.471,16	105,10
1	Pendapatan Asli Daerah	97.985.725.574,00	112.742.966.251,16	115,06
2	Pendapatan Transfer	1.723.789.178.110,00	1.801.965.643.220,00	104,54
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : LRA 2024 Unaudited, BPKAD Kab. Barito Kuala

Tabel 4.2
**Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Kuala T.A 2024
Berdasarkan Jenis Belanja Daerah**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
II	Belanja Daerah	2.042.939.648.639,00	1.940.244.032.483,07	94,97
1	Belanja Operasi	1.335.625.611.760,00	1.249.862.128.116,07	93,58
2	Belanja Modal	422.492.896.473,00	409.635.608.917,00	96,96
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	360.250.000,00	9,01
4	Belanja Transfer	280.821.140.406,00	280.386.045.450,00	99,85

Sumber : : LRA 2024 Unaudited,, BPKAD Kab. Barito Kuala

**BAB V****INOVASI DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala, telah menginventarisasi dan menghimpun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024, Kabupaten Barito Kuala memperoleh nilai skor IID sebesar 39,40 dengan kategori Inovatif dan menempati peringkat ke-269 dari 415 Kabupaten se-Indonesia.

Adapun Inovasi Daerah yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala

No.	Judul Inovasi	Deskripsi	SKPD
1	SIMPEL PRO TANI (Sistem Pengawasan Program Pertanian Berbasis Teknologi Informasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala)	Inovasi berupa Pelaporan Pelayanan/ Penyuluhan oleh Petugas lapangan pertanian (PPL)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	MELANJUTKAN LINTASAN (Menindaklanjuti Hasil Audit Kearsipan Melalui Link Data Arsip)	Inovasi ini berupa layanan yang digunakan untuk menindaklanjuti Hasil Audit Kearsipan OPD melalui link Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	SIPERANG (Sistem Persediaan Barang)	Inovasi berupa aplikasi yang digunakan untuk memonitor persediaan barang di Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	SI-BUBA (Sistem Informasi Budaya Batola)	Inovasi yang Memberikan informasi kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Barito Kuala Melalui Aplikasi Online	Disporbudpar



5	SI-LISA (Optimalisasi Layanan Pemerintah Desa Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi Desa Cerdas)	Inovasi Layanan Pemerintahan Desa secara elektronik di Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	BBI BISA (Bahitung Benih Iwak Dengan Batakar Iwak Sederhana Alatnya)	Inovasi berupa alat sederhana untuk menghitung benih ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	TRIPKON -S GANDA	Inovasi mengurangi Pencemaran Lingkungan Melalui Inovasi Pengolahan Tinja	Dinas Kesehatan
8	PersediaanKU (Optimalisasi Inventarisasi Barang Persediaan Melalui Aplikasi)	Inovasi Pengelolaan Barang Persediaan Secara Online pada Bakesbangpol Kab. Batola	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Fitur Search Database Barang Milik Daerah Melalui Google Form Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Inovasi Penyediaan fitur Pencarian Data Milik Daerah Melalui Google Form	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10.	Sudut Kreasi Kemasan Rumah Pintar Cahaya Baru	Inovasi Penyediaan Jasa Pembuatan Kemasan Produk UMKM secara Gratis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	KERUPUK SAPAT (Ketuk Rumah Penduduk pemeriksaan Penyakit Tidak Menular)	Inovasi Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular secara <i>door to door</i>	Dinas Kesehatan
12.	SILAKI (Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis Digital)	Inovasi Pelaporan Kinerja SKPD melalui Aplikasi	Dinas Perhubungan
13.	Aplikasi Pengawasan Rutin Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023	Inovasi Pengawasan Rutin Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14.	SIBEKANTAN (Sinergitas Bersama Untuk	Inovasi Pembangunan Ramah Lingkungan di	Dinas Lingkungan



	Meningkatkan Desa Berkelanjutan)	Pedesaan	Hidup
15.	SIPARAS (Sistem Informasi Pengendalian Anggaran Kas)	Inovasi Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran Kas di SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
16.	PAK RS (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)	Inovasi Pendaftaran Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	SIMANDAI (Sistem Informasi Masyarakat Dan Administrasi Rumah Sakit)	Inovasi Penyediaan Layanan Rumah Sakit Terintegrasi	RSUD H. Abdul Aziz
18.	BISA (Barito Kuala Investasi Secara Jemput Bola)	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Investasi melalui Jemput Bola Ke Kecamatan	DPMPTSP
19.	Konsultasi Online Pengawas Intern	Inovasi Pelayanan Konsultasi secara Online Bagi Pengawas Intern	Inspektorat
20.	BAKUL SI UMIK (Barito Kuala Promosi Usaha Mikro)	Inovasi Promosi Usaha Mikro melalui Kegiatan Pameran dan Event Pasar Rakyat	Diskoperindag
21.	eSAPA-BISA (Elektronik Sahabat Perempuan Dan Anak)	Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DPPKBP2A
22.	Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Campuran Aspal	Inovasi Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Bahan Aspal	Disperkim
23.	SI PERSIT (Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Surat Menyurat Dan Arsip Melalui Sistem Website)	Inovasi Pengelolaan Surat Menyurat Melalui Sistem Website	SET-DPRD
24.	SI BADA	Inovasi Pelayanan Pada Bagian Pemerintahan Setda Batola	SETDA
25.	SICaKeP (Sistem Informasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah)	Inovasi Untuk Monitoring Capaian Kinerja SKPD Melalui Aplikasi	DISBUNNAK



26.	LIMBAT (Layanan Intensif Masyarakat Bayar Ditempat)	Inovasi untuk memudahkan pelayanan pajak dan Retribusi daerah	BP2RD
27.	Optimalisasi Penatausahaan Arsip Berbasis Elektronik (SI ELMA BERBAGI)	Inovasi Untuk Optimalisasi penatausahaan arsip berbasis Elektronik	BPBD
28.	Pengumpulan Data Kinerja Melalui Aplikasi “KIMFO”	Inovasi untuk Capaian Kinerja melalui Aplikasi	Dikominfo
29.	Sistem Informasi Inovasi Daerah Barito Kuala (SINOVARA BAKULA)	Inovasi untuk Capaian Kinerja melalui Aplikasi	Bappelitbang
30.	Rama Untuk Rosa	Inovasi Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Desa	Kec. Wanaraya
31.	BERKAT (Program Pembinaan Aparat Desa)	Inovasi Pembinaan Aparat Desa di Kecamatan Tabunganen	Kecamatan Tabunganen
32.	WABAH (Wadah Anak Yang Bersentuhan Hukum)	Inovasi Pembinaan Anak yang terkena kasus	Kecamatan Anjir Pasar
33.	Sweet Seventeen Gifts	Inovasi pemberian kado KTP Elektronik bagi warga masyarakat yang berulang tahun yang ke 17	Kec. Barambai
34.	Konservasi Bahasa Bakumpai	Inovasi Pembudayaan Bahasa Bakumpai di Masyarakat Desa	Kec. Bakumpai
35.	ALALAK HARAT (Handal Melayani Masyarakat)	Inovasi Peningkatan Pelayanan Masyarakat oleh aparat Desa dan Kecamatan	Kec. ALalak
36.	SI CHANTING (Edukasi Lewat Chat WA Calon Pengantin Cegah Stunting)		Kec. Anjir Muara
37.	GERMENCAB (Gerakan Menanam Cabe)	Inovasi Gerakan Masyarakat Menanam Cabe	Kec. Tabukan
38.	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Gigi Anak)	Inovasi berupa Pelayanan Kesehatan Gigi	Drg. Hilda Ayu Setyowati
39.	Sistem Informasi Pelayanan Barito Kuala (SIPOLA) Berbasis Robot Demi Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	Inovasi berupa pelayanan publik	Muhammad Al Faridho Awwal (Hasnur)

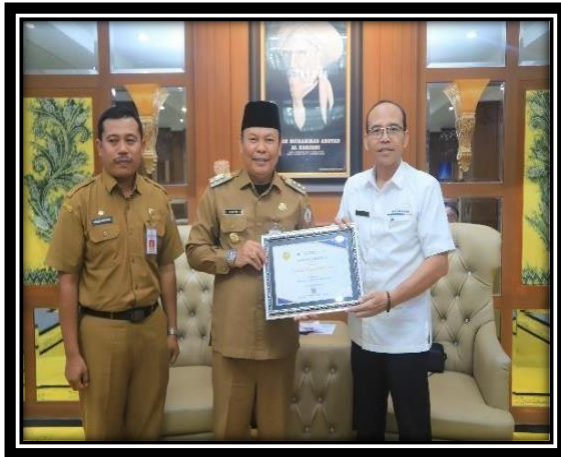


40.	Daur Naik Inovasi Produk Limbah Pakaian	Inovasi berupa untuk mengurangi dampak negatif industri <i>fashion</i> terhadap lingkungan	Noor Rizka
41.	Penggunaan Animasi Sebagai Media Layanan Informasi Publik	Inovasi berupa untuk meningkatkan pemahaman dan ketertarikan masyarakat dalam memahami informasi yang disajikan pemerintah melalui media sosial	Junaidi, Dkk
42.	Solusi Irigasi Pertanian Dengan Sistem Irigasi Bebas Teknologi Informasi (TI) Atau Smart Irrigation System (SIS)	Inovasi berupa untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi biaya produksi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Muhammad Khutami
43.	Desa Inovatif : Bangun Desa Bangun Indonesia	Inovasi berupa untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di masyarakat pedesaan	Muhammad Hidayattullah
44.	Bumi Saver Inovasi Pengelolaan Sampah Makanan Di Barito Kuala Dengan Platform Digital	Inovasi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan melalui pengumpulan makanan berlebih untuk didistribusikan kepada kaum duafa	Apriani Tri Kesuma Wardani
45.	Surung Sintak Pengusir Burung Manual	Inovasi pembuatan alat pengusir burung pemakan padi sawah	Hatni
46.	Pirolisator Sederhana Untuk Pembuatan Asap Cair Sebagai Pertisida Alami	Inovasi berupa Pembuatan Alat Pirolisator Sederhana	Alorisa Tirta Ardiyanti
47.	Meningkatkan Kemampuan Numerasi Peserta Didik Melalui Program Math Drilling Dan Numerasi	Inovasi berupa kemampuan numerasi peserta didik	Desnalia Sari
48.	UMKM GO-DIGITAL: (1 Menit Buat Toko Online Dan Aplikasi Kasir Yang Keren Di MYUMKM.ID)	Inovasi Berupa Solusi Digital Terpadu Untuk Usaha Mikro	Yazid AUFAR
49.	BRIPA (Briket Tempurung Kelapa)	Inovasi Berupa Manfaat Tempurung Kelapa	Nisrina Aika, Dkk
50.	Aplikasi “Leftover Batola” Sebagai Solusi Permasalahan Stunting Dan Pemborosan Makanan Di Barito Kuala	Inovasi Untuk Mengurangi Tingginya Angka Stunting	Noor Rahmadani



51.	Bottle Is Diamond Transformasi Sampah Botol Plastik Oleh Generasi Z Di SMA GIBS Untuk Mendukung SDGs 12	Inovasi Untuk Pengelolaan Sampah Plastik	Rima, Dkk
52.	MOSEKA (Molen Selai Nangka)	Inovasi Untuk Pemnafaatan Buah Nangka Menjadi Makanan Ringan	Nabilla Puteri, Dkk
53.	Selai Pisang Mahuli	Inovasi Pembuatan Produk Makanan Ringan Dari Buah Pisang Mahuli	Sofhieyana Kurniawati Erlangga, Dkk
54.	PEBRINEDOSELAN (Pembuatan Briket Eceng Gondok Sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan)	Inovasi Untuk Pemanfaatan Enceng Gondok Menjadi Barang Yang Lebih Bermanfaat	Aulia Fadyati Amini ,Dkk
55.	BIO-ENERGY CELL (BELL)	Inovasi Untuk Pemnafaatan Limbah Organik Menjadi Barang Yang Lebih Bermanfaat	Radhit Aufa Taparrod,Dkk
56.	Keberlanjutan Daur Ulang Pakaian Menjadi Sebuah Fashion Item Tote Bag Sebagai Upaya Sustainable Fashion	Inovasi Untuk Pemanfaatan Kain Perca Menjadi Barang Kerajinan	M. Hadi Saputra, Dkk
57.	Teh Daun Sirsak (DASAK)	Inovasi Pemanfaatan Daun Sirsak Menjadi Minuman Bermanfaat	Ahmad Realdi Rahman, Dkk
58.	Selai Buah Karamunting Bahan Alami	Inovasi pembuatan buah karamunting menjadi bahan kue	Salsabilla Miftahul Nijka, Dkk
59.	KETEPI (Kertas Tebu Pisang)	Inovasi pemanfaatan dan pemilahan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat	Muhammad Rifky Pratama, Dkk

**PENGHARGAAN YANG DIRAIH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**



Penghargaan Dari
Kementerian Keuangan
Atas Penyaluran Dak Fisik
Terbaik Tahun Anggaran
2024



Penghargaan Dari
Kementerian Keuangan
Atas Terbaik Dalam
Rekonsiliasi Penyetoran
Pajak Pusat Atas Beban
Apbd Tahun Anggaran
2023



Adipura 2023 Kategori
Kota Kecil



Penghargaan atas Komitmen
Batola Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi Perangkat Desa, BPD
dan non ASN



Penghargaan atas Capaian
Laporan Realisasi Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Non
Fisik Terbaik Tingkat
Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Selatan TA 2023

Penghargaan atas
Komitmennya Dalam
Pelaksanaan Perlindungan
Bahasa Daerah Sebagai
Bagian Dari Platform
Merdeka Belajar Episode Ke
17 Revitalisasi Bahasa
Daerah



Penghargaan Atas Peran Aktif
Dalam Fasilitasi Penerbitan
Shm Transmigrasi



Predikat Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Yang ke 9
Kali Berturut Turut



Pemerintah Daerah Dengan
Jumlah Penertiban Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU)
Terbanyak Tahun 2023 di
Provinsi Kalimantan Selatan



Terbaik Regional IV Apresiasi
BKB Terbaik Tingkat Nasional
Tahun 2024



Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2024 (Kota Madya)



Penghargaan Atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Sehingga Seluruh Desa di Kabupaten Barito Kuala Mencapai Status Mandiri, Maju dan Berkembang



Menerima Alokasi Intensif Fiskal Kinerja Berjalan Tahun Anggaran 2024 Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah Senilai Rp. 7.388.851.000

Penghargaan Bhumandala Kanaka (Medali Emas) Untuk Kategori Kabupaten Bhumandala



Juara 3 Kategori Inigenting
Capaian Tercepat 100%
Tahun 2024



Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala Melalui Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu Kab.
Batola Sebagai Unit Kerja
Pelayanan Bepredikat
Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi(WBK)



Pemda Tercepat Dalam
Menyelesaikan Rekonsiliasi
Pajak Pusat Atas Belanja
APBD Tahun 2024



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **bangsa**

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**